

Evaluasi Kebijakan Kegiatan Kader Surabaya Hebat Di Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Policy Evaluation Of The Kader Surabaya Hebat Activity In Tandes District Surabaya City

Muhammad Dzira Naufal

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: muhammaddzira.22128@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Kader Surabaya Hebat adalah masyarakat yang bertugas mendukung Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan berbagai persoalan sosial serta kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes, Surabaya, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan serta dokumentasi terhadap sejumlah informan dari berbagai seluruh pelaksana dan peserta kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 sebagai landasan operasional kegiatan. Melalui analisis pelaksanaan kegiatan, termasuk pemeriksaan jentik nyamuk, pendampingan posyandu keluarga, dan pelaporan melalui aplikasi digital, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kinerja kader, tingkat koordinasi dengan pemerintah kota, serta berbagai kendala operasional yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun program telah dijalankan sesuai prosedur dan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, masih ditemukan permasalahan terkait konsistensi pelaporan, kapasitas kader, dan kesesuaian antara target kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan desain kebijakan, memperkuat pembinaan kader, dan mengoptimalkan sistem pemantauan, sehingga program Kader Surabaya Hebat dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pembangunan komunitas di Kecamatan Tandes.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, William N. Dunn, Kader Surabaya Hebat.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan peran komunitas. Salah satu inisiatif penting dalam kerangka tersebut adalah kegiatan Kader Surabaya Hebat, yang dirancang untuk memperbesar kontribusi masyarakat sebagai mitra

pemerintah dalam proses identifikasi, pemantauan, dan penanganan isu kesehatan, lingkungan, dan sosial di tingkat rumah tangga (Judi et al., 2023). Kegiatan ini menugaskan kader sebagai pelaksana utama berbagai aktivitas lapangan yang berhubungan langsung dengan warga. melalui pendekatan partisipatif, kebijakan tersebut tidak hanya memperluas jangkauan

layanan pemerintah, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran serta perilaku kolektif masyarakat terkait kesehatan lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kota Surabaya.

Kecamatan Tandes merupakan wilayah dengan jumlah kader yang cukup banyak serta memiliki keragaman sosial dan ekonomi masyarakat yang signifikan. Keragaman kondisi permukiman, tingginya kepadatan penduduk, dan perbedaan tingkat keterlibatan warga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kader Surabaya Hebat di wilayah ini melaksanakan berbagai aktivitas, seperti pemeriksaan jentik nyamuk, pendampingan posyandu keluarga, penyuluhan kesehatan lingkungan, serta pendataan kondisi kesejahteraan masyarakat secara berkala. Selain itu, seluruh kegiatan harus dilaporkan melalui aplikasi digital berbasis geolokasi guna memastikan akuntabilitas program pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Kompleksitas tanggung jawab tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan, karena keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas kader, dukungan struktur pemerintahan lokal, serta dinamika sosial masyarakat setempat.

Evaluasi kebijakan berperan sebagai alat untuk menilai sejauh mana suatu program publik mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta mengatasi permasalahan yang melatarbelakangi perumusannya. Pada Program Kader Surabaya Hebat, evaluasi diperlukan untuk menelaah tingkat keberhasilan implementasi di lapangan, kesesuaian instrumen kebijakan yang digunakan, dan keterkaitan program dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Proses evaluasi juga memungkinkan teridentifikasinya berbagai hambatan operasional, termasuk keterbatasan pemahaman kader terhadap prosedur kerja,

kendala teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan, dan penolakan sebagian warga terhadap kegiatan kunjungan rumah. evaluasi kebijakan tidak hanya menyoroti capaian akhir program, tetapi juga mengungkap dinamika proses pelaksanaannya yang berpengaruh terhadap mutu kebijakan secara keseluruhan.

Untuk memperoleh pemahaman evaluatif yang lebih mendalam, penelitian ini mengadopsi kerangka evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn. Kerangka tersebut memuat enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria ini memberikan landasan analisis yang komprehensif karena tidak hanya menilai ketercapaian tujuan program, tetapi juga mengkaji distribusi manfaat, kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian instrumen yang digunakan dengan persoalan yang ingin diatasi. Pendekatan ini relevan diterapkan pada Program Kader Surabaya Hebat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, membutuhkan koordinasi antara instansi, mengandalkan sistem pelaporan digital, dan beroperasi dalam lingkungan sosial masyarakat yang beragam.

Pelaksanaan kebijakan program kader di Kecamatan Tandes menunjukkan adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah kelurahan maupun kecamatan, namun capaian program tidak semata-mata bergantung pada aspek struktural tersebut. Menurut (Kusumadewi & Rosdiana, 2024), kompetensi kader sebagai pelaksana di lapangan berperan besar terhadap mutu kegiatan, khususnya terkait pemahaman mengenai kesehatan, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan menggunakan teknologi digital. Selain itu, tingkat partisipasi dan penerimaan masyarakat juga mempengaruhi kelancaran program, karena sejumlah aktivitas seperti

kunjungan rumah dan pendataan jentik membutuhkan sikap terbuka serta kerja sama dari warga. Perbedaan kemampuan antar kader serta beragamnya respon masyarakat menimbulkan tantangan dalam implementasi, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih sistematis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dengan melihat beragam dinamika implementasi di lapangan, penelitian evaluatif terhadap kegiatan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes menjadi esensial untuk menghadirkan bukti empiris mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan tujuan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Melalui penggunaan kerangka evaluasi William N. Dunn, penelitian ini diharapkan mampu menelaah unsur-unsur yang telah berjalan optimal sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, termasuk peningkatan kapasitas kader, penguatan sistem pelaporan digital, perbaikan koordinasi antarinstansi, dan pengembangan strategi untuk memperluas keterlibatan masyarakat. Temuan evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan berbasis pemberdayaan komunitas di wilayah perkotaan lainnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan strategis yang dirancang pemerintah untuk merespons persoalan masyarakat dan mewujudkan tujuan kolektif. Dalam kerangka negara hukum, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dan legal, tetapi juga sebagai mekanisme politik dan manajerial yang mengatur tindakan bersama demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Hiplunudin,

(2025), menegaskan bahwa kebijakan publik menjadi landasan pembangunan nasional yang mencerminkan keterlibatan masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka mencapai kesejahteraan. Membagi kebijakan publik ke dalam tiga prinsip utama, yaitu proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan kerangka yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai sasaran publik. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai dokumen atau produk hukum, melainkan sebagai proses yang bersifat dinamis dan melibatkan beragam aktor serta tahapan.

Menurut William N. Dunn dalam Pramono, (2025), proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan utama, yaitu penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Tahap penetapan agenda menjadi fase awal ketika suatu persoalan publik dikenali dan ditempatkan sebagai isu prioritas yang memerlukan intervensi pemerintah. Selanjutnya, tahap perumusan kebijakan mencakup penyusunan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap pengambilan keputusan, pemerintah menentukan alternatif yang dianggap paling tepat dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, maupun teknis. Implementasi kebijakan kemudian menjadi fase krusial karena pada tahap inilah keputusan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di masyarakat. Sementara itu, evaluasi kebijakan bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan serta dampak yang dihasilkan, baik dari segi keluaran maupun hasil akhir, sekaligus menyediakan dasar bagi penyempurnaan kebijakan ke depan.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasinya. Menurut Epa et al., (2025) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan mencakup analisis terhadap isi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta konsekuensi yang ditimbulkan bagi masyarakat. Juga menegaskan bahwa evaluasi bertujuan mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan manfaat dari kebijakan atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Menurut Dunn dalam Nasution et al., (2025) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan memiliki karakteristik tertentu, antara lain berorientasi pada nilai, bergantung pada fakta dan nilai secara simultan, bersifat retrospektif, dan mengandung unsur dualitas nilai. Selain itu, Dunn menekankan bahwa evaluasi berfungsi menyediakan informasi mengenai kinerja kebijakan, memperjelas nilai-nilai yang melandasi sebuah kebijakan, serta menjadi dasar bagi proses perbaikan dan reformulasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan diperlukan seperangkat kriteria yang mampu menilai keberhasilan maupun kegagalan program secara objektif. Dunn menguraikan lima kriteria pokok dalam evaluasi kebijakan, yakni efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Kecukupan meninjau kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan dasar sasaran, pemerataan melihat distribusi manfaat antar kelompok sosial, responsivitas menilai kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan publik, dan ketepatan mengukur kesesuaian kebijakan dengan tujuan serta konteks permasalahan. Di sisi lain, Edward

A. Suchman mengajukan pendekatan evaluasi yang berfokus pada proses, mencakup penetapan tujuan, analisis masalah, hingga penilaian dampak serta perubahan sosial. Selain itu, model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan Stufflebeam juga menjadi kerangka evaluasi yang signifikan untuk menilai program pendidikan maupun sosial secara menyeluruh.

Kebijakan tentang Kegiatan Kader Surabaya Hebat

Kegiatan Kader Surabaya Hebat merupakan bagian dari kebijakan pelayanan publik Pemerintah Kota Surabaya yang dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program kesehatan, sosial, dan lingkungan di tingkat kelurahan. Ketentuan mengenai program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kader Surabaya Hebat, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi penugasan, tata kerja, dan tanggung jawab para kader dalam mendorong percepatan tujuan pembangunan daerah. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan perlunya pedoman yang jelas dan sistematis agar implementasi program dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan akuntabel.

Kegiatan Kader Surabaya Hebat disusun sebagai wujud pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut dari (Fauzi & Suprobowati, 2023) mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana, kejelasan peran yang diemban, serta tersedianya pendampingan dan sumber daya yang memadai. Dalam konteks tersebut, para kader menjalankan fungsi sebagai representasi pemerintah

dalam sejumlah tugas, termasuk pemeriksaan jentik nyamuk, pemantauan kesehatan keluarga, penyuluhan lingkungan, dan pengumpulan data sosial. Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan konsep pendekatan sosial dan ekonomi yang menempatkan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lokal sebagai dasar pencapaian pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkembang.

Dengan merujuk pada kerangka evaluasi yang dikemukakan William N. Dunn, efektivitas kegiatan Kader Surabaya Hebat dapat ditinjau dari tingkat perubahan positif pada pemahaman serta praktik pengasuhan para pesertanya. Aspek efisiensi tampak melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, termasuk peran kader dan penggunaan fasilitas posyandu. Kecukupan kegiatan dapat dilihat dari keluasan materi yang disampaikan serta kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Unsur pemerataan tercermin dari keterlibatan peserta yang tersebar di berbagai kelurahan, sementara responsivitas tampak pada kemampuan program menyesuaikan substansi dan pendekatannya dengan karakteristik masyarakat setempat. Ketepatan sasaran ditunjukkan melalui fokus program pada kelompok yang memiliki kerentanan terhadap kesehatan. Dengan demikian, melalui evaluasi yang komprehensif, tingkat keberhasilan kegiatan Kader Surabaya Hebat sebagai kebijakan publik dapat diukur secara menyeluruh dan berpotensi menjadi model yang dapat diterapkan di daerah lain dengan permasalahan serupa.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian evaluasi kebijakan Kegiatan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes Kota Surabaya untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai

pelaksanaan program berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengkaji secara rinci aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan implementasi kegiatan kader sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada kader, koordinator wilayah, dan aparat kelurahan, melakukan observasi terhadap aktivitas seperti pemeriksaan jentik nyamuk, pendampingan posyandu keluarga, serta penyampaian informasi layanan publik, dan menelaah dokumen pelaporan yang diunggah melalui aplikasi “Kamera Peta GPS”. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi, dikelompokkan, dan dianalisis untuk melihat adanya perbedaan antara aturan kebijakan dan praktik di tingkat kelurahan. Melalui rancangan penelitian ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara terstruktur dan objektif sehingga menghasilkan penilaian yang komprehensif terhadap pelaksanaan program serta masukan perbaikan bagi peningkatan kinerja kader di Kecamatan Tandes.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas menunjukkan bahwa kegiatan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes telah berkontribusi pada peningkatan pemantauan sosial dan kesehatan masyarakat, terutama melalui kegiatan pemeriksaan jentik nyamuk, pendampingan posyandu keluarga, serta pemutakhiran data kerawanan sosial. Namun, pencapaian output dari sebagian kegiatan belum sepenuhnya merata antar kelurahan, lantaran adanya variasi kapasitas kader dan perbedaan tingkat keterlibatan warga. Di beberapa wilayah seperti Kelurahan Balongsari dan Manukan Kulon,

capaian kegiatan cenderung lebih tinggi karena komunikasi lintas lembaga berjalan lebih aktif, sedangkan di wilayah lain ditemukan kendala dalam pelaporan digital dan koordinasi rutin. Secara keseluruhan, program telah berjalan cukup efektif, namun masih membutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan agar seluruh target dapat tercapai secara konsisten.

Efisiensi

Jika ditinjau dari aspek efisiensi, penggunaan sumber daya manusia dan anggaran program menunjukkan kesesuaian dengan rencana kerja pemerintah kota, tetapi pelaksanaan di lapangan memperlihatkan beberapa ketidakseimbangan. Jumlah kader yang besar—lebih dari seratus orang di Kecamatan Tandes belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan teknis yang merata, khususnya terkait penggunaan aplikasi "Kamera Peta GPS" yang menjadi instrumen utama pelaporan kegiatan. Kondisi ini menyebabkan sebagian kader memerlukan pendampingan tambahan, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih panjang. Selain itu, peralatan pendukung seperti alat cek jentik, informasi edukasi, dan perangkat dokumentasi masih terbatas sehingga kader sering menggunakan sarana pribadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski secara administratif program dinilai efisien, namun pada tingkat operasional masih terdapat ruang perbaikan dalam distribusi sumber daya dan peningkatan kapasitas kader.

Kecukupan

Indikator kecukupan menilai sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang sosial dan kesehatan. Berdasarkan temuan lapangan, kehadiran Kader Surabaya Hebat telah membantu masyarakat untuk memperoleh akses informasi, pendampingan kesehatan keluarga, serta

penghubung ke layanan pemerintah. Namun, kebutuhan masyarakat terhadap edukasi kesehatan, pendampingan warga rentan, dan penanganan masalah sosial masih belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan waktu kerja kader dan luasnya cakupan wilayah. Di beberapa RW, kegiatan monitoring jentik nyamuk masih bersifat insidental dan bergantung pada tingkat partisipasi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecukupan program masih harus diperkuat melalui penambahan fungsi kader, peningkatan pelatihan tematik, dan pengembangan jejaring kolaboratif dengan puskesmas, kelurahan, RT/RW, serta lembaga lokal.

Pemerataan

Dari aspek pemerataan, distribusi manfaat program belum sepenuhnya merata antarwilayah di Kecamatan Tandes. Kelurahan-kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi memerlukan intensitas pendampingan yang lebih besar, namun jumlah kader tidak disesuaikan secara proporsional dengan kondisi lapangan. Selain itu, terdapat perbedaan kapasitas individu kader yang berpengaruh pada kualitas layanan yang diterima masyarakat. Kader dengan pengalaman lebih lama cenderung melaksanakan tugas secara lebih sistematis, sementara kader baru membutuhkan adaptasi dalam menerapkan SOP dan pelaporan digital. Hal ini menunjukkan perlunya pemerataan peningkatan kompetensi, penyusunan pembagian wilayah kerja yang lebih proporsional, serta rotasi kader untuk menjaga stabilitas kualitas layanan antar wilayah.

Responsivitas

Responsivitas program menunjukkan seberapa jauh kegiatan kader mampu menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, kader menunjukkan tingkat responsivitas yang baik dalam menangani laporan terkait jentik nyamuk,

permasalahan kesehatan balita, hingga aduan sosial seperti kerawanan pangan atau warga lanjut usia tanpa pendamping. Namun, responsivitas tersebut masih terkendala oleh mekanisme pelaporan yang harus melalui aplikasi, sehingga kader membutuhkan waktu tambahan sebelum dapat mengajukan tindak lanjut ke pemerintah kota. Selain itu, tidak semua warga mengetahui peran kader secara lengkap sehingga aduan sering terlambat diterima atau tidak tersampaikan. Dengan demikian, peningkatan sosialisasi, percepatan alur koordinasi, dan penyederhanaan proses pelaporan sangat diperlukan untuk memperkuat responsivitas program.

Ketepatan

Ketepatan menjadi aspek penentu apakah kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Program Kader Surabaya Hebat dirancang untuk mendukung pelayanan sosial dan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan secara umum kebijakan ini telah tepat dalam menjawab tantangan urban seperti tingginya mobilitas warga, kerawanan kesehatan lingkungan, serta kebutuhan pendampingan masyarakat rentan. Akan tetapi, ketepatan program belum sepenuhnya optimal karena implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi data antar lembaga, dan adanya ketimpangan kemampuan kader. Untuk meningkatkan ketepatan pencapaian tujuan, perlu penguatan sistem monitoring berbasis teknologi, pelatihan yang lebih terstruktur, serta penyelarasan program kerja kader dengan prioritas pembangunan kelurahan dan kecamatan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi kebijakan kegiatan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes menunjukkan bahwa pelaksanaan program

telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan pelayanan sosial dan kesehatan berbasis masyarakat. Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn—meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan—program ini dinilai telah berjalan cukup baik dalam mencapai target utama, terutama dalam pemantauan kesehatan lingkungan, pendampingan posyandu keluarga, serta identifikasi masalah sosial. Namun demikian, efektivitas dan pemerataan pelaksanaan masih dipengaruhi oleh variasi kemampuan kader, perbedaan intensitas koordinasi antarwilayah, dan tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata.

Dari sisi efisiensi, penggunaan sumber daya manusia dan anggaran telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah, tetapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan perlunya peningkatan dukungan sarana agar kader dapat bekerja secara optimal. Kecukupan program dalam menjawab kebutuhan masyarakat terlihat positif, walaupun cakupan layanan belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh isu sosial dan kesehatan yang berkembang. Responsivitas kader terhadap kebutuhan warga cukup baik, tetapi proses pelaporan dan koordinasi formal masih perlu disederhanakan untuk mempercepat tindak lanjut. Dalam aspek ketepatan, program dinilai sesuai dengan tujuan kebijakan, meskipun implementasinya masih membutuhkan penyesuaian agar mampu menjawab tantangan operasional dan dinamika masyarakat secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, program Kader Surabaya Hebat di Kecamatan Tandes telah memberikan manfaat strategis bagi masyarakat dan pemerintah daerah, namun peningkatan kapasitas kader, penguatan sistem pelaporan, pemerataan alokasi sumber daya, serta optimalisasi koordinasi

antarinstansi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Kader

Pelatihan berkala yang lebih terstruktur dan tematik perlu diberikan, terutama terkait penggunaan teknologi pelaporan, deteksi dini masalah kesehatan lingkungan, pendampingan sosial, dan komunikasi publik. Hal ini penting untuk menyamakan kualitas kinerja kader antarwilayah.

2. Perbaikan Sistem Koordinasi dan Pelaporan

Mekanisme pelaporan kegiatan melalui aplikasi perlu disederhanakan dan dipercepat, serta didukung dengan bimbingan teknis yang memadai. Selain itu, koordinasi antara kader, kelurahan, puskesmas, dan kecamatan perlu diformalkan melalui pertemuan rutin agar tindak lanjut masalah dapat dilakukan lebih efektif.

3. Pemerataan Distribusi Sumber Daya dan Wilayah Kerja

Pemerintah perlu meninjau kembali jumlah kader pada setiap wilayah berdasarkan beban kerja dan jumlah penduduk agar pembagian tugas lebih proporsional. Selain itu, penyediaan sarana pendukung seperti alat cek jentik, media edukasi, serta perangkat dokumentasi perlu ditingkatkan.

4. Penguatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi mengenai peran dan fungsi Kader Surabaya Hebat harus diperluas melalui kegiatan kelurahan, media komunitas, dan platform digital agar masyarakat memahami saluran pengaduan dan

dapat terlibat aktif mendukung program.

5. Integrasi Data dan Pengawasan Berbasis Teknologi

Pengembangan sistem informasi terpadu antara kecamatan, kelurahan, dan puskesmas dapat meningkatkan ketepatan data serta mempermudah monitoring dan evaluasi program secara real time. Pengawasan berbasis teknologi juga dapat meminimalkan ketidaksesuaian pelaporan.

6. Penguatan Pendekatan Kolaboratif

Program perlu mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, RT/RW, dan lembaga kesehatan dalam setiap kegiatan agar intervensi sosial dan kesehatan lebih komprehensif dan keberlanjutan program dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Epa, A., Apriyani, A., Maryam, J., Azahra, S. N. I., Muthmainah, Z. A., & Herdiana, D. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 42–49.
- Fauzi, A. S., & Suprobawati, D. (2023). Peran Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam mewujudkan kampung bersih dan sehat (PHBS) di Kelurahan Lontar. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 3(3), 106–116.
- Hiplunudin, A. (2025). *Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik: tinjauan kritis ilmu administrasi negara*. Penerbit Andi.
- Judi, T. E., Jusnita, T. D., Harianto, E., & Dewi, N. D. U. (2023). Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Mandiri Melalui Kader Surabaya Hebat. *ABDI MASSA*:

- Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 3(05), 39–49.
- Kusumadewi, A. N., & Rosdiana, W. (2024). Analisis kompetensi Kader Surabaya Hebat di Kelurahan Balongsari Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, 3(4).
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., Devianty, T., Nampira, R. A., Lumbanraja, V., & Vidiastuti, D. P. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Pramono, J. (2025). *Pengantar Kebijakan Publik*. UnisriPress.